

PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LINGGA DALAM PEMERATAAN LISTRIK DI KECAMATAN LINGGA UTARA (STUDI KASUS DESA PERSIAPAN PASIR LULUN)

Oleh

Haris Wahyudi

NIM. 2005010027

ABSTRAK

Kabupaten Lingga terdiri dari 13 kecamatan dan 84 Desa/Kelurahan, dari 13 kecamatan tersebut terdapat 1 desa di Kecamatan Lingga Utara yang sangat minim dalam memenuhi kebutuhan listrik yaitu Desa Persiapan Pasir Lulun. Untuk memenuhi kebutuhan listrik selain berasal dari PLN, masyarakat menggunakan mesin genset untuk memenuhi kebutuhan listrik secara merata yang berasal dari Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya peran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan listrik dan kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dan PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik di Desa Persiapan Pasir Lulun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang dapat diartikan sebagai bentuk suatu proses pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang muncul pada saat melakukan penelitian yang kemudian dikaitkan dengan teori Peran Pemerintah menurut Soerjono Soekanto dalam (Riyan Tika Syafitri, 2023). Hasil penelitian menjelaskan Peran Pemerintah sebagai Regulator, Pemerintah belum memiliki peraturan daerah yang mengatur masalah listrik. Peran Pemerintah sebagai Dinamisator yaitu dengan memberikan arahan dan Berkoordinasi dengan PLN terkait masalah Listrik Desa. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator yaitu dengan memberikan bantuan Dana Desa, Bahan Bakar Minyak (Solar), dan pembukaan akses jalan. Selain itu untuk kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Lingga yaitu Faktor Geografis, Jumlah Penduduk yang sedikit, dan Infrastruktur jalan yang kurang mendukung. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lingga dalam menjalankan perannya belum berjalan dengan baik sehingga belum dapat melakukan pemerataan pembangunan di bagian Listrik Desa.

Kata Kunci : Peran, Pemerataan, Listrik

**THE ROLE OF THE LINGGA DISTRICT GOVERNMENT IN EQUALIZING
ELECTRICITY IN THE LINGGA UTARA DISTRICT (CASE STUDY OF
PASIR LULUN PREPARATION VILLAGE)**

By

Haris Wahyudi

2005010027

ABSTRACT

Lingga Regency consists of 13 sub-districts and 84 villages/sub-districts, of the 13 sub-districts there is 1 village in North Lingga District which is very minimal in meeting electricity needs, namely the Pasir Lulun Preparation Village. To meet electricity needs other than from PLN, the community uses generators to meet electricity needs evenly which come from Village Funds. This study aims to determine the extent of the role of the local government in meeting electricity needs and the obstacles faced by the local government and PLN in meeting electricity needs in Pasir Lulun Preparation Village. This study uses a qualitative research method with a descriptive research type, which can be interpreted as a form of a problem-solving process by describing the state of the research subject based on the facts that emerged when conducting the research which were then linked to the theory of the Role of Government according to Soerjono Soekanto in (Riyan Tika Syafitri, 2023). The results of the study explain the Role of the Government as a Regulator, the Government does not yet have regional regulations that regulate electricity problems. The role of the Government as a Dynamist is to provide direction and Coordinate with PLN regarding Village Electricity problems. The role of the Government as a Facilitator is by providing assistance in the form of Village Funds, Fuel Oil (Solar), and opening road access. In addition, the obstacles faced by the Lingga Regency Government are Geographical Factors, Small Population, and Inadequate road infrastructure. Based on the results of the study, it can be concluded that the Lingga Regency Government has not been able to carry out its role properly so that it has not been able to carry out equitable development in the Village Electricity sector.

Keywords: Role, Equalization, Electricity